

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Negara Indonesia didominasi oleh pedesaan, meskipun beberapa ciri pedesaan perlahan meredup bersamaan dengan proses industrialisasi dan globalisasi. Oleh karena itu, usaha membangun masyarakat desa untuk melawan kemiskinan dan untuk meningkatkan taraf hidup harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa yang akan datang. Perencanaan dan implementasi pembangunan berisi usaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Pembangunan masyarakat di suatu desa merupakan hal yang sangat penting untuk memperbaiki kualitas hidup penduduk desa serta memperkuat kemandirian.¹

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) diatur dalam Pemendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Bab I ketentuan umum Pasal 3 yang berbunyi "Pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam bagian kedua Pemendagri No. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa diatur pembangunan SDM dalam poin pemberdayaan masyarakat yang mengatur tentang ; pertama usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan. Kedua pelatihan

¹Dr Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 31.

teknologi tepat guna. Ketiga pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Keempat, peningkatan kapasitas masyarakat.

Peraturan Pmendagri No. 114 tahun 2014 mengenai peraturan mengenai pedoman pembangunan desa yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi aparatur desa dalam melaksanakan pembangunan desa (Pembangunan Sumber Daya Manusia). Untuk menentukan sebuah program pemerintah desa dalam pembangunan sumber daya manusia, Kepala Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) harus bekerjasama dan saling membantu untuk menyusun sebuah program pembangunan yang memiliki orientasi terhadap perbaikan mutu hidup masyarakat desa. Kerjasama yang dilakukan tersebut menjadi upaya untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran pembangunan sumber daya manusia.²

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah membentuk berbagai program yang salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diseluruh wilayah Indonesia. PKK merupakan sebuah organisasi yang terbentuk sejak tahun 1972, organisasi yang telah diakui oleh masyarakat, pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga karena melalui 10 program pokok PKK telah mampu melibatkan wanita dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarki, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan

² Iis, *Pengembangan Sumber Daya Manusia/Manusia Strategis Dalam Organisasi Pendidikan Luar Sekolah*, Artikel Online, Tahun 2013

martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para istri kepala dinas/jawatan dan istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada tanggal 27 Desember 1972 mendagri mengeluarkan surat no. Sus 3/6/12 kepada seluruh gubernur tk.I Jawa Tengah dengan tembusan gubernur seluruh Indonesia, agar mengubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga. Sejak itu gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “hari kesatuan gerak PKK” yang diperingati pada setiap tahun. Tim penggerak PKK berada ditingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Kelurahan). Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.³ Peran PKK sangat strategis sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan

³ Drs. H. Roesmidi & Dra. Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alqaprint Jatiangor, 2008, hal. 123, bab Pemberdayaan Perempuan.

kesejahteraan pemberdayaan masyarakat terutama perempuan. Kegiatan PKK bukan hanya menjalankan program pokok dari pemerintah tetapi juga berasal dari diri sendiri dengan suka rela.

PKK juga berenergi terhadap pembangunan masyarakat, PKK bisa menjadi pihak garda terdepan dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Misalnya, mensosialisasikan kepada remaja tentang rawan dan risiko pernikahan usia dini, menggerakkan ibu-ibu bagaimana caranya menekan angka kematian ibu hamil, juga berkontribusi dalam mengatasi masalah gizi anak kesehatan anak dan stunting, beberapa hal tersebut merupakan suatu tugas PKK dalam menjalankan perannya terhadap pembangunan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dan bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Desa/kelurahan dan masyarakatnya mempunyai kedudukan dan potensi yang sangat penting, serta sifat umum masyarakat yang sederhana dalam perilaku yang perlu dibangun dan dibina usaha pembangunan negara. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita dari kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 alenia IV. Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan usaha kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana dan bertanggung jawab

dalam mencapai tujuan kearah perubahan-perubahan yang lebih baik yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi rakyat yang adil.

Dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk diaplikasikan dan menjadi aspirasi. Pembangunan menitikberatkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada. Pembangunan juga diartikan proses menggambarkan adanya pengembangan, baik meliputi proses pertumbuhan (growth) maupun perubahan (change) dalam kehidupan bersama, sosial, dan budaya. Pembangunan saat ini bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi sudah mencakup kepada pembangunan dalam kehidupan masyarakat.⁴

Kelurahan Kauman terletak di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, merupakan kelurahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Secara pelaksanaan dalam pengimplementasian pembangunan desa/kelurahan sudah beberapa yang telah dijalankan. Namun pembangunan fisik dan nonfisik di Kelurahan Kauman masih belum seimbang. Yang mana pemerintah Kelurahan Kauman lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibanding pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana pembangunan SDM sangatlah penting. Mengingat manusia adalah pelaku dari pembangunan itu sendiri. Penelitian ini dititikberatkan di Kelurahan Kauman khususnya di Kauman Gang 6 dan 7, dimana di tempat tersebut masih banyak ditemui permasalahan sosial

⁴Dr Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 31.

misalnya, maraknya fenomena pernikahan anak usia dini yang disebabkan kehamilan pra-nikah, kurangnya gizi/kesehatan buruk terhadap anak-anak dan balita, keluarga kurang mampu tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya disebabkan karena terlalu banyak anak, banyaknya pengangguran, dan juga pemukiman kumuh masih ditemui di Kelurahan Kauman gang 6 meskipun sudah adanya bantuan dari pemerintah desa setempat (program bedah rumah) namun pemukiman di tempat tersebut masih terlihat kurang layak disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat dan tidak dapat menjaga kebersihan lingkungan.

PKK Kelurahan Kauman terbentuk sejak tahun 1992 sejak pengangkatan Lurah pertama kali di Kelurahan Kauman. Tim PKK Kelurahan Kauman beranggotakan 20 wanita dari setiap RT (istri setiap ketua RT dan RW, dan beberapa warga lain yang berkenan bergabung menjadi anggota secara sukarela) dengan dipimpin oleh Bu Lurah (istri Kepala desa/Lurah). PKK Kelurahan Kauman merupakan mitra intensif dan aktif bagi pemerintahan desa Kelurahan Kauman dalam menjembatani pembangunan sumber daya manusia dari lingkup yang paling kecil (keluarga). Dalam pembangunan sumber daya manusia dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam sebuah prosesnya, Tim PKK Kelurahan Kauman atau bisa juga disebut kader PKK memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang aktif dijalankan untuk memberdayakan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat/warga kauman agar menjadi lebih baik, antara lain; posyandu balita, pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan Posyandu Lansia, semua itu dilakukan rutin setiap satu bulan sekali, hal tersebut dilakukan intensif terutama untuk memantau dan memperbaiki kesehatan bagi warga Kelurahan Kauman juga kesehatan dan pertumbuhan generasi selanjutnya.

PKK disini tidak hanya sebuah organisasi yang hanya diperuntukan sebagai tempat berkumpulnya ibu rumah tangga, namun juga untuk menjalankan tugas-tugas sebagai garda terdepan dalam menghadapi fenomena sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kader PKK Kelurahan Kauman dalam mengimplementasikan tugasnya juga dibekali ilmu dari setiap pelatihan-pelatihan ataupun penyuluhan-penyuluhan yang telah di ikuti dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten untuk diterapkan dalam setiap menjalankan tugasnya. Salah satu program inti yang di laksanakan oleh Tim PKK adalah pembangunan kesehatan baik bagi keluarga maupun lingkungan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan tujuan penulisan ini, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

Bagaimana efektifitas peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas peran PKK terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri ataupun bagi siapapun yang menggunakannya.

Kegunaan penelitian ini terbagi dua yaitu :

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang pembangunan kesehatan masyarakat dan ilmu sosial.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan refrensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dengan judul Efektifitas Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat adalah terkait dengan bagaimana efektifitas dari Tim Penggerak PKK dalam upaya membangun kesehatan masyarakat di Kelurahan Kauman. Batasan penelitian ini terikat dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2019 sampai Bulan Februari tahun 2020.